

## **BAB II**

### **KERANGKA PEMECAHAN MASALAH**

#### **A. Terjadinya Konflik Jalan Lingkungan Di Kelurahan Sukapada**

Proses peralihan kepemilikan lahan kosong terjadi sejak akhir 2004 dan selesai pada tahun 2005, dan sejak itu yayasan/universitas menjadi pemilik lahan secara sah. Sebelum proses peralihan lahan, yayasan mengajukan persyaratan agar permasalahan dengan masyarakat sekitar yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan jalan lingkungan yang melintas di lahan tersebut diselesaikan oleh pemilik pertama dengan unsur kelurahan setempat. Proses negosiasi dengan masyarakat Sukaharja pada tahun 2005 berlangsung beberapa bulan, karena masyarakat keberatan dan menolak rencana yayasan untuk menutup jalan dan mengalihkannya ke bagian selatan lahan dengan jarak tempuh yang lebih jauh. Selain itu rencana penutupan jalan tersebut secara fisik telah memecah RW 03 menjadi dua bagian dan secara tidak langsung memutus hubungan sosial dan menghambat berbagai aktivitas masyarakat. Namun, proses negosiasi ini akhirnya melahirkan “kesepakatan” yang melibatkan masyarakat satu RT (RT 07 RW 03 yang secara fisik jalan tersebut berada di wilayah teritorinya) yang menyatakan tidak keberatan pengalihan jalan dengan menerima kompensasi.

Kesepakatan itu membuat konflik di antara masyarakat Sukaharja sehingga muncul saling ketidakpercayaan antarmasyarakat dan pengurus formal (Ketua RW, Ketua RT dan beberapa tokoh masyarakat). Konflik berlangsung terus dan kondisinya makin tidak kondusif setelah pihak yayasan mulai membenteng secara permanen dengan tembok setinggi 2,5 meter sekeliling lahan sampai menutup jalan lintas lapangan. Tuduhan sebagian besar masyarakat di luar RT 07 yang membuat kesepakatan sebagai “penjual jalan”, “penghianat”, menyebabkan pertentangan/pertengkaran dan saling curiga yang berkepanjangan.

Reaksi masyarakat makin meluas tidak saja di Sukaharja, tetapi reaksi masyarakat Babakan Baru terutama RW 16 karena dampak yang ditimbulkan oleh

penutupan jalan tersebut dirasakan sangat memberatkan. Misalnya mereka yang berangkat kerja dengan berjalan kaki, anak-anak berangkat dan pulang sekolah dan mengaji, ibu-ibu yang berangkat ke pasar pada waktu subuh, pengangkutan sampah ke TPS yang terhambat, dan warung-warung kecil yang terpaksa tutup. Jalan ini sudah puluhan tahun berfungsi sebagai jalur transportasi yang mempermudah berbagai aktivitas masyarakat, serta sebagai ruang publik yang berperan dalam mengikat hubungan sosial dan emosional antarwarga. Sehingga “peniadaan” jalan yang tidak memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, keamanan dan psikologis masyarakat ini menumbuhkan konflik dan rasa permusuhan di kalangan masyarakat terhadap yayasan.

## **B. Gerakan Kemasyarakatan**

Sejak penutupan jalan tersebut pada bulan Pebruari 2006, dimulailah satu proses “litigasi” oleh beberapa perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Tim Usulan Jalan<sup>1</sup> dengan melakukan dialog dan negosiasi baik melalui Muspika setempat (Lurah dan Camat), dialog juga dilakukan dengan bertemu langsung dengan pihak yayasan dan universitas. Proses ini berlangsung sampai awal bulan April dengan harapan dapat selesai melalui kesepakatan dan kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga lingkungan dan saling berbagi antar masyarakat kampung dengan masyarakat kampus tanpa melibatkan pihak luar.

Namun, tidak adanya hasil yang dicapai menyebabkan keresahan dan konstelasi konflik makin tinggi. Masyarakat yang beragam persepsi dan sikapnya dalam penyelesaian kasus ini makin mengarah pada perpecahan kelompok-kelompok masyarakat. Tim dan masyarakat melanjutkan proses ke tingkat DPRD Kota dan Walikota untuk memfasilitasi penyelesaian.

Keterbukaan akses informasi dan masyarakat yang kritis, memungkinkan masyarakat untuk melakukan advokasi secara partisipatif. Dengan pendekatan ini, masyarakat diajak untuk mengenali berbagai peraturan daerah (Perda), terutama Perda

---

<sup>1</sup> Tim ini dibentuk oleh Forum RW Kelurahan Sukapada yang berfungsi sebagai perwakilan masyarakat untuk melakukan proses negosiasi dalam penyelesaian konflik dengan yayasan/universitas. Anggota Tim terdiri dari ibu-ibu (kaum perempuan) perwakilan dari tiap-tiap RW (RW 03, RW 08 dan RW 16).

tentang pengairan dan sempadan sungai serta Rencana Umum Tata Ruang Kota yang secara langsung berhubungan dengan kasus tersebut. Ini dapat terjadi karena persoalan penutupan jalan ini berpengaruh terhadap kepentingan dan hajat hidup masyarakat sehari-hari. Pengetahuan masyarakat tentang aturan inilah yang menjadi modal untuk melakukan diskusi, pembahasan, dialog, merencanakan tindakan sampai pada bentuk-bentuk tindakan yang harus diambil.

Penguatan gerakan masyarakat dilakukan dengan mengkonsolidasikan berbagai komponen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pimpinan formal dari masing-masing RW untuk mensosialisasikan substansi dan tujuan perjuangan untuk mengembalikan fungsi jalan yang dapat dipergunakan masyarakat luas. Pertemuan-pertemuan, audiensi dengan DPRD, Walikota dan Dinas terkait dilakukan oleh masyarakat dengan membagi tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Proses yang berlangsung lebih dari empat bulan, makin memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan akses jalan kembali karena institusi formal baik legislatif maupun eksekutif kota memberikan penguatan yang mengarah pada penegakan aturan (Perda) dan pertimbangan kepentingan masyarakat banyak. Dan pada akhirnya, bulan Juni 2006 benteng yang menutup jalan lingkungan tersebut dibuka kembali dan berfungsi sebagai fasilitas sosial yang dapat dipergunakan masyarakat umum.

### **C. Beberapa Metode Pemecahan Masalah**

#### **1. Model Pendampingan Masyarakat dalam Penyelesaian Masalah Jalan Lingkungan**

Model pendampingan kepada masyarakat ditujukan sebagai upaya mengembangkan program edukasi kepada masyarakat melalui pola-pola yang lebih berorientasikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki responsifitas dan tanggungjawab yang tinggi terhadap lingkungannya. Keterlibatan

secara langsung dan bersama-sama masyarakat menghadapi dan menyelesaikan masalah, merupakan program pengabdian yang sangat efektif. Karena selain memberikan manfaat kepada masyarakat di satu sisi, pola semacam ini juga secara akademis merupakan implementasi nilai-nilai keilmuan.

Beberapa kasus menunjukkan, banyak persoalan yang dihadapi masyarakat pinggiran yang secara sosial, ekonomi dan pendidikan masih rendah tidak dapat diselesaikan dengan tuntas bahkan seringkali menyisakan persoalan lain yang makin memposisikan masyarakat pada situasi yang tidak menguntungkan. Pola-pola lama yang dilakukan para penguasa atau pengusaha yang berorientasi pada keuntungan pribadi, masih banyak terjadi pada kasus-kasus perebutan lahan di perkotaan. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak warga negara, lemahnya posisi tawar serta mudahnya masyarakat terpecah-pecah merupakan faktor lain yang memperburuk situasi konflik.

## **2. Model Perencanaan dan Perancangan Jalan Lingkungan**

Di tengah arus global dan kultur masyarakat perkotaan yang individualistis, kampung kota tetap menjadi bagian terbesar yang mengisi kehidupan kota-kota di Indonesia. Masyarakat “transisi” yang seringkali termarginalkan dari kehidupan formal-modern elit kota, berada pada tekanan perubahan kultur yang serba “tanggung”. Di satu sisi, kemiskinan, pola hidup masyarakat kampung masih menyisakan ciri-ciri tradisionalitas dalam membangun kebersamaan, relasi antar-individu serta kesepakatan-kesepakatan sosial kemasyarakatan. Tapi di sisi lain, tekanan kehidupan kota yang “sibuk” dan “tak peduli” pada lingkungan ini menyebabkan persaingan, kecurigaan, dan segala bentuk gaya hidup yang berorientasi pada pemuasan kepentingan individu. Dua pola inilah yang membentuk karakter khas masyarakat kampung kota, yang sebenarnya merupakan potensi komunitas yang harus tetap dibangun.

Pola pembentukan jalan/gang pada komunitas masyarakat kampung kota memiliki kekhasan tersendiri, ada kesepakatan tidak tertulis pada komunitas tersebut untuk membangun bersama ruang publik. Tidak tersentuhnya jaringan

infrastruktur kota secara formal, membuat masyarakat terbiasa untuk membangun secara mandiri (alamiah) lingkungan mereka meskipun tidak tertata dan memadai secara maksimal. Setiap kali ada pengembangan di satu titik permukiman akan berlanjut ke titik permukiman lainnya dengan membangun secara bersama-sama jalan baru yang dapat menyatukan titik-titik permukiman tersebut.

Dengan demikian, bukanlah hal yang sulit untuk melibatkan masyarakat dalam merencanakan, merancang sampai pada proses pembangunan jalan sesuai dengan kebutuhan.

### **3. Model Pendampingan Masyarakat dalam Mengorganisasikan Kegiatan Pembangunan**

Di masyarakat kampung kota, kegiatan pembangunan lingkungan yang dilaksanakan merupakan program yang relatif sudah berjalan melalui organisasi RT dan RW maupun lurah setempat. Namun dalam beberapa hal yang menyangkut organisasi masih perlu penataan. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan masyarakat dapat terorganisir dengan baik dan berkelanjutan. Artinya, dengan pendampingan profesional, kegiatan masyarakat diharapkan lebih terarah dan terpadu.

### **4. Model Pelaksanaan Proses Pembangunan Jalan Lingkungan**

Model yang dikembangkan merupakan penerapan proses pembangunan yang berbasis masyarakat setempat, mulai dari pemberdayaan sumber dana lokal sampai pada sumber daya manusia yang melaksanakan pembangunannya. Penggalan dan penguatan cara-cara tradisional seperti iuran/rembugan dana, kerja bakti (gotong royong)serta rembugan warga untuk memusyawarahkan berbagai kegiatan masih tetap menjadi model yang paling efektif diterapkan.

Model ini bukanlah hal yang asing bagi masyarakat di daerah pinggiran (kampung kota), karena kegiatan-kegiatan pembangunan fisik sudah terbiasa dilakukan secara swadaya dan bersama-sama. Sehingga pelaksanaan model seperti ini tidak akan mendapatkan kendala yang berarti.

## **5. Model Tindak Lanjut**

Tercapainya target program pada suatu kasus studi belum dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan program dalam kerangka yang lebih luas. Begitu banyak persoalan yang dihadapi masyarakat baik sosial kemasyarakatan maupun masalah fisik lingkungan yang belum tersentuh.

Pada program jangka panjang yang dirancang oleh tim pengabdian pada masyarakat di Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, diterapkan model tindak lanjut yang berkesinambungan. Setelah program di RW 03, program selanjutnya akan dilaksanakan di RW 16. Fokus pembangunan fisik masih berkaitan dengan pemanfaatan dan mengoptimalkan daerah bantaran Sungai Cihalarang yang dapat berfungsi sebagai jalan lingkungan dan jalur hijau.